

para pemilik media terkadang menggunakan media massa yang dimilikinya untuk kepentingannya sendiri, seperti beriklan mengenai partai politik yang di naunginya di media yang ia miliki dan menyajikan berita yang berpihak pada hal-hal yang berkaitan atas ideologi media tersebut.

3. Jenis-jenis Konstruksi Media

Kehidupan kita sebagai masyarakat yang berada dalam perkembangan teknologi komunikasi yang sangat pesat, membuat kita tidak sadar akan dampak yang besar untuk kehidupan kita, semakin sering kita mengakses teknologi semakin besar pula perubahan sosial dalam kehidupan keseharian kita, contohnya: masyarakat lebih individualis karena informasi yang kita butuhkan semuanya telah ada di telephon genggam yang kita miliki. Telephon genggam sekarang ini tidak hanya memiliki fungsi mengirim surat pendek (SMS) atau telepon saja, perusahaan-perusahaan telephon genggam telah menyulap telephon genggam sebagai alat canggih yang dapat kita bawa kemana-mana, bagaimana tidak dengan telephon genggam yang kita miliki, kita dapat mengakses informasi-informasi yang kita butuhkan, karena telah dilengkapi dengan aplikasi internet yang menunjang, dengan mudah kita memperoleh informasi tersebut tanpa bersusah payah bertanya kepada orang lain.

Kecanggihan teknologi komunikasi yang telah saya paparkan diatas, secara tidak langsung mempermudah media massa untuk mengkonstruksi masyarakat dalam peyampaian pesan yang diinginkan, dengan teknologi yang canggih media massa dapat menyebarkan informasi tersebut tanpa harus memikirkan media apa yang digunakan dalam penyampaian pesan atau informasi.

Tujuan didirikannya Muhammadiyah untuk menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Untuk mewujudkan tujuan dari organisasi ini usaha yang dilakukan yaitu sebagai berikut :

1. Muhammadiyah melaksanakan da'wah *amar ma'ruf nahi munkar* dan *tajdid* yang diwujudkan dalam usaha diselenggarakan bidang kehidupan.
2. Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program, dan kegiatan, yang macam dan penyelenggaraannya diatur dalam anggaran rumah tangga.
3. Penentu kebijakan dan penanggung jawab amal usaha, program, dan kegiatan adalah pimpinan Muhammadiyah.

Anggota dari Muhammadiyah terdiri atas, anggota biasa, anggota luar biasa dan anggota kehormatan. Anggota biasa ialah warga negara Indonesia beragama Islam, anggota luar biasa ialah orang Islam bukan warga negara Indonesia dan anggota kehormatan adalah anggota perorangan beragama Islam yang berjasa terhadap Muhammadiyah dan atau karena kewibawaan dan keahliannya bersedia membantu Muhammadiyah.

Kepemimpinan Muhammadiyah terdiri dari pimpinan pusat dimana pimpinan pusat merupakan pimpinan tertinggi yang memimpin Muhammadiyah secara keseluruhan, anggota dari pimpinan pusat ini sekurang-kurangnya terdiri atas tiga belas orang yang dipilih dan ditetapkan oleh muktamar untuk satu masa jabatan dan calon-calon yang diusulkan oleh tanwir. Ketua umum pimpinan pusat ditetapkan oleh muktamar dari dan atas usul anggota pimpinan pusat terpilih. Anggota pimpinan pusat terpilih menetapkan sekretaris umum dan diumumkan dalam forum muktamar.

Pimpinan pusat dapat menambah anggota apabila dipandang perlu dengan mengusulkannya kepada tanwir. Pimpinan pusat diwakili oleh ketua umum atau salah seorang ketua bersama-sama sekretaris umum atau salah seorang sekretaris, mewakili Muhammadiyah untuk tindakan didalam dan diluar pengadilan. Selain ada pimpinan pusat Muhammadiyah juga memiliki pimpinan wilayah, pimpinan wilayah memimpin Muhammadiyah dalam wilayahnya serta melaksanakan kebijakan pimpinan pusat. Pimpinan daerah, yaitu memimpin Muhammadiyah dalam daerahnya serta melaksanakan kebijakan pimpinan di atasnya. Pimpinan cabang, memimpin Muhammadiyah dalam cabangnya serta melaksanakan kebijakan pimpinan di atasnya dan yang terakhir adalah pimpinan ranting, pimpinan ranting memimpin dalam rantingnya dan melaksanakan kebijakan pimpinan di atasnya.

Dalam organisasi tentunya dibutuhkan permusyawaratan didalamnya, hasil dari permusyawaratan inilah yang nantinya akan menentukan laju atau langkah-langkah sebuah organisasi untuk kedepannya. Berdasarkan anggaran dasar Muhammadiyah di Bab IX Permusyawaratan, Muhammadiyah memiliki beberapa permusyawaratan yang pertama adalah muktamar, muktamar ialah permusyawaratan tertinggi dalam Muhammadiyah yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab pimpinan pusat, anggota muktamar terdiri atas anggota pimpinan pusat, ketua pimpinan wilayah, anggota tanwir wakil wilayah, ketua pimpinan daerah, wakil daerah dipilih oleh musyawarah pimpinan daerah, terdiri atas wakil cabang berdasarkan pertimbangan jumlah cabang dalam tap daerah dan wakil pimpinan organisasi otonom tingkat pusat. Muktamar diadakan satu kali dalam lima tahun. Permusyawaratan kedua yaitu muktamar luar biasa, muktamar luar biasa ini merupakan muktamar darurat

bisnis medianya, mereka lebih mementingkan keuntungan dibandingkan dengan apa yang dibutuhkan khalayak. Isi pesan yang disampaikan oleh media lebih kepada apa yang sedang hangat dipasar, para pemilik media berlomba-lomba menyampaikan pesan yang sama, akan tetapi pesan-pesan yang disampaikan dari satu media dengan media yang lainnya cenderung pada keterpihakkan yang mana keterpihakkan tersebut mengarah pada ideologi apa yang dianut oleh media tersebut.

Keegoisan media atas pesan yang disampaikan kepada khalayak luas dan cenderung memihak kepada sesuatu yang sesuai ideologinya, secara tidak langsung akan mengkonstruksi masyarakat mengenai opini atas pesan yang disampaikan oleh media tersebut, jika masyarakat yang membaca atau melihat adalah masyarakat yang mengetahui kondisi media massa saat ini mungkin tidak akan mempengaruhi kehidupan sosial mereka, namun jika yang mempersepsikan adalah masyarakat awam yang tidak tahu menahu atas kondisi media, maka akan menimbulkan perubahan sosial atau bahkan konflik antara masyarakat satu dengan yang lainnya.

Seperti yang disampaikan oleh Shramm bahwa, media massa khususnya radio, televisi dan surat kabar berperan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Tetapi kenyataannya di negara dunia ketiga menghadapi berbagai hambatan untuk menjelaskan fungsinya, sebab dalam prespektif kekuasaan Negara berdasarkan pendapat McQuail, penyebaran informasi melalui media massa, adalah dominasi kekuasaan politik sehingga jauh dari hak atau kebebasan masyarakat untuk memperoleh informasi yang realistis, akurat dari sumber kreadibilitasnya diakui.

Sedangkan dalam konteks fungsi Suwardi menyatakan, media massa mampu menggambarkan realitas politik, namun harus diingat pula bahwa kehidupan pers di suatu negara akan mengikuti sistem yang hidup dalam negara yang bersangkutan. Dengan demikian setiap negara mempunyai sistem pers sendiri. Dan sebagaimana

